

ABSTRAK

Sempitnya lapangan pekerjaan di dalam negeri merupakan salah satu faktor pendorong angkatan kerja Indonesia yang umumnya usia muda mencari pekerjaan di Negara lain, tapi ada juga ke luar negeri bukan menjadi pekerja tapi melanjutkan pendidikan di jenjang lebih tinggi. Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia, yang paling banyak bermasalah adalah TKI selain kurangnya pendidikan, dan masih usia muda. Metode penulisan jurnal ini menggunakan jenis hukum normative, yang bermakna acuannya pada peraturan perundang-undangan atau studi dokumen, tapi mencantumkan optik sosiologis untuk tulisan. Para TKI keluar negeri ada yang tidak resmi, bahkan dari segi kelengkapan dokumen pun tidak memenuhi syarat sebagai pekerja di luar negeri. Akibatnya terjadi tindak kekerasan terhadap TKI oleh majikan di tempat mereka bekerja. Kasus yang muncul bermula pada proses hukum. Hukum diterapkan adalah hukum di negara tempat TKI bekerja. Hukum cambuk, hokum mati, dan hukuman seumur hidup menjadi berita-berita surat khabar di tanah air. Kementerian Luar Negeri menjalankan fungsinya, dan berperan dan bertanggung jawab sesuai wakil Negara di luar negeri terutama meyelesaikan secara diplomasi. Saran penulis untuk mencegah tindak kekerasan oleh majikan, menghindari terjadinya hukuman berat bagi pekerja, maka diperlukan pembekalan ketrampilan bagi calon TKI dengan pelatihan secara komprehensif sehingga memiliki bekal cukup terutama bahasa Negara tempat tujuan TKI bekerja. Lain rumput lain pula belalanya, artinya tiap negara memiliki budaya, adat istiadat yang berbeda, dan ini harus dipahami oleh TKI. BP3TKI sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam hal pencegahan harus membuka konter-konter di pelabuhan udara dan pelabuhan laut mencegah lolosnya TKI yang dibawah umur, tidak memiliki pengetahuan atau ketrampilan cukup, dan selidik pelabuhan tidak resmi yang menjadi tempat pengiriman TKI ilegal tersebut.

Kata Kunci : Kementerian Luar Negeri, BP3TKI, TKI

ABSTRACT

The narrowness of employment in the country is one of the factors driving the Indonesian labor force, which is generally young age looking for job in other countries, However, there are some young people to continue their study for higher level education.. According to the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia, the most problematic are TKI lack of education, and still young. The method of writing this journal using the type of normative law, which means reference to legislation or document study are secondary data, but include from the sociological optics for writing. The workers outside the country are unofficial, even in terms of completeness of documents were not eligible as workers abroad. As a result, there were violence against migrant workers by employers where they work. The case that emerged boils down to the legal process. The law applied is the law in the country where migrant workers work. Whipping laws, death penalty, and life sentence became news reports in the country. The Ministry of Foreign Affairs performs its functions, and assumes role and responsibility according to the representative of the State overseas especially diplomacy. The writer's suggestion to prevent the violence by the employer, to avoid the occurrence of severe punishment for the worker, it is necessary to provide skills for prospective migrant workers with comprehensive training so as to have sufficient supplies, especially the language of the country where the migrant worker is working. Another grass also different grasshopper, meaning that each country has a culture, different customs, and this should be understood by TKI. BP3TKI as an institution responsible for prevention should open counters at airports and seaports to prevent the escape of underage workers, lack adequate knowledge or skills, and investigate unauthorized ports where the migrant workers are sent.

Keywords: Ministry of Foreign Affairs, BP3TKI